

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arinanto, Satya. 2008. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia. Cetakan Ketiga*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Auby (ed), Jean-Bernard. 2014. *Codification of Administrative Procedure*. Groupe Larcier. Bruxelles.
- Bruggink, JJ.H. diterjemahkan oleh B.Arief Sidharta. 2015. *Refleksi tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. 2018. *Laporan Tahunan Ditjen PSP Tahun 2018*. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Direktorat Pangan dan Pertanian. 2015. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)*. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu. Jakarta.
- HR, Ridwan .2006. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Ilmar, Aminuddin .2004. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Kencana. Jakarta.
- Indrati, Maria Farida 1998, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. PT Kanisius. Yogyakarta.
- Kaelan. 2012. *Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*. Paradigma. Yogyakarta.
- Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Peningkatan Kedaulatan Pangan. 2016. *Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Peningkatan Kedaulatan Pangan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta.
- Kristanto, Andi. 2007. *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*. Gava Media. Klaten.

- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas, Pancasila*, Pustaka Utama Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cetakan 1. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Noer, Deliar. 1991. *Mohammad Hatta Biografi Politik*. Cet. Kedua. LP3ES. Jakarta.
- Pane, Nina, Ed., Mohammad Hatta. 2015. *Politik, Kebangsaan, Ekonomi (1926-1977)*. Ctk. Pertama. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Cetakan Ketujuh. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sudarto. 2013. *Hukum Pidana I Edisi Revisi*. Yayasan Sudarto. Semarang.
- Sukarman, Widagdo. 2014. *Liberalisasi Perbankan Indonesia: Suatu Telaah Ekonomi-Politik*. Cetakan Pertama. Kepustakaan Populer Gramedia. Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum. Rajawali Pers. Jakarta*.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Rajawali Pres. Jakarta.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto. 2013. *Pengantar Hukum Pertanian*. Gaperindo. Jakarta.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Rajawali Pers. Jakarta
- Uhi, James Alexander. 2016. *Filsafat Kebudayaan, Konstruksi Pemikiran Cornelis Anthonie van Peursen dan Catatan Refleksinya*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

## **B. Hasil Penelitian**

- Alting, Husein .2006. “Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat atas Tanah di Maluku Utara Perspektif Dinamika Hukum di Era Otonomi

Daerah”. *Disertasi*. Fakultas Pascasarjana Universitas Brawijaya. Malang.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2016. “Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan dalam rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia”. *Penelitian*. Kementerian Hukum dan HAM RI.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2016. “Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Peningkatan Kedaulatan Pangan”. *Hasil Penelitian*. Kementerian Hukum dan HAM RI. Jakarta.

Bakry, Mohammad Ryan .2010. “Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Konsep Good Governance di Indonesia”.*Tesis*.Fakultas Hukum . Universitas Indonesia.

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan. 2015. “Kajian Penyusunan Materi Teknis Pedoman Sinkronisasi Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan”. *Penelitian*. Kementerian PPN/BAPPENAS. Jakarta.

Hidayat, Yayat. 2017.”Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Rumah Tangga Petani (Studi Kasus Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka)”. *Tesis*, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Muchsin. 2003. “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”. *Tesis*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Pramudita, Danang. 2015. “Insentif dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kuningan”. *Tesis*, Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Prastowo, Nugroho Joko, dkk. 2008. “Pengaruh Distribusi dalam Pembentukan Harga Komoditas dan Implikasinya terhadap Inflasi”. *Working Paper WP/07/2008*. Bank Indonesia.

Setiawati, Tity Wahyu, dkk. 2018. “Politik Hukum Pertanian Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Global”. *Penelitian*.Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.

Setiono. 2004. “Rule of Law (Supremasi Hukum)”.*Tesis*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Setyawan, Adji . 2016. “Pelaksanaan Penetapan Batas Luas Maksimum dan Minimum Tanah Pertanian di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung

Selatan.: *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Wahyuni, Ira Puspita Sari .2013. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman di Indonesia”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang.

### C. Jurnal

Astomo, Putera. “Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional di Era Demokrasi”.*Jurnal Konstitusi*. Volume 11. Nomor 3. September 2014.

Ayu, Isdiyana Kusuma, dkk. “Perlindungan Hukum terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan di Indonesia”. *Jurnal Ketahanan Pangan*. Volume 2.Nomor 2. Desember 2018.

Cahyaningrum, Dian. “Pelindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Pangan dari Pengalihan Fungsi untuk Non Pertanian Pangan:.. *Jurnal Negara Hukum*. Volume 10. Nomor 1. Juni 2019.

Deni Danial Kesa dan Cheng-Wen Lee, Kebijakan Sektor Pertanian sebagai Awal Kebangkitan Ekonomi (Studi Kasus Taiwan dalam Mengelola Komoditas Padi), *Jurnal Vokasi Indonesia*, Vol.1, No.1, Januari-Juni, 2013.

Dwi Sasono. “Pemberdayaan Petani: Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian di Indonesia” . *Jurnal Penyuluhan*. Volume 4. Nomor 1. Maret 2008.

Erwiningsih, Winahyu.”Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara atas Tanah Menurut UUD 1945”. *Jurnal Hukum*. Volume 16. No. Edisi Khusus. Oktober 2009.

Indraningsih, Kurnia Suci. “Implementasi dan Dampak Penerapan Legislasi Penyuluhan Pertanian Terhadap Capaian Swasembada Pangan”. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*. Volume 13. Nomor 2. Desember 2015.

Kurniastuti, Ari Ratna, Afifah Kusumadara, dan Setyo Widagdo. ”Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari Dampak Adanya Perjanjian *Asean-China Free Trade Area* (ACFTA)”. *Jurnal Arena Hukum*. Volume 6. Nomor 2. 2013.

Mayrowarni, Henny . “Pembangunan Pertanian pada Era Otonomi Daerah: Kebijakan dan Implementasi”. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Volume 30. Nomor 1. Juli 2012.

- Putra, Made Suyana. “Potensi dan Peningkatan Investasi di Sektor Pertanian dalam rangka Peningkatan Kontribusi terhadap Perekonomian di Provinsi Bali:.” *Buletin Studi Ekonomi*. Volume 18. Nomor 1. Februari 2013.
- Rondhi, Mohammad,dkk.”Agricultural Land Conversion, Land Economic Value, and Sustainable Agriculture: A Case Study in East Java Indonesia”. *Journal Land MDPI*. Volume 148. No.7.
- S, Laurensius Arliman . “Perlindungan Hukum UMKM dari Eksploitasi Ekonomi dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat:.” *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 6. Nomor 3. Desember 2017.
- Simatupang, Pantjar, dan Nizwar Syafa’at. “Industrialisasi Berbasis Pertanian Sebagai *Grand Strategy* Pembangunan Ekonomi Nasional”. *FAE*. Volume 18. No.1 dan 2. Desember 2000.
- Subejo. “Penyuluhan Pertanian Indonesia di Tengah Isu Desentralisasi Privatisasi dan Demokratisasi”. *Jurnal Penyuluhan*.Volume 2. Nomor 2. Juni 2006.
- Suryana, Achmad dan Munawar Khalil N. “Proses dan Dinamika Penyusunan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan”. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Volume 35. Nomor 1. Juli 2017.
- Usman. “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*.Volume 2. Nomor 1. 2011.
- Pratiwi, Leni.”Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum terhadap Perbedaan Pengaturan Barang Impor dalam Keadaan Baru”. *Jurnal Ius Quia Iustum*. Volume 25. Januari 2018.
- Warto. “Kondisi Kemiskinan Petani dan Upaya Penanggulangannya”. *Jurnal PKS*. Volume 14. Nomor 1. Maret 2015.
- Weruin, Urbanus Ura . “Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum”. *Jurnal Konstitusi*. Volume 14. Nomor 2. Juni 2017.
- Widjaja, Gunawan. “Lon Fuller Pembuatan Undang-Undang dan Penafsiran Hukum”. *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*. Volume VI. Nomor 1.Juli 2006.

#### D. Artikel/Makalah

Nugroho, Wahyu Budi. “Konstelasi Ekonomi, Sosial, dan Politik di Era Orde Baru”. *Peringatan 19 Tahun Reformasi yang diselenggarakan oleh BEM-PM Universitas Udayana*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 27-28 Mei. 2018.

Sawit MH dalam Gatoet S. Hardono,dkk. “Liberalisasi Perdagangan: Sisi Teori, Dampak Empiris, dan Perspektif Ketahanan Pangan”. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Volume 22 . No.2.Desember 2004.

Statuta Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN). 2009.

Tulus Tambunan, “Perkembangan Industri dan Kebijakan Industrialisasi di Indonesia Sejak Orde Baru Hingga Pasca Krisis”, *Kadin Indonesia-JETRO* disampaikan pada November 2006.

#### E. Informasi Daring

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan diakses melalui <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=definisi-dana-dekonsentrasi> pada 07 Februari 2020.

Faisal, Abdul. *UU Sistem Budidaya Tanaman Berkelanjutan Jangan Susahkan Petani*, ditulis pada 26 September 2019, diakses melalui <https://www.antaraneews.com/berita/1083972/uu-sistem-budidaya-pertanian-berkelanjutan-jangan-susahkan-petani> pada 28 September 2019 pukul 20.05 WIB.

Hidayat, Rofiq . “Poin Penting UU Sistem Budi daya Pertanian”. Rabu 25 September 2019 diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d8b40de73433/poin-penting-uu-sistem-budi-daya-pertanian-/> pada 05 Januari 2020.

Luthfi, Wihdi . *Lindungi Petani dan Peternak, Asuransis Pertanian Serentak Diterapkan Tahun 2021*, 13 Februari 2020 diakses melalui <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/02/13/lindungi-petani-dan-peternak-asuransi-pertanian-serentak-diterapkan-tahun-2021> pada 28 April 2020.

Marsindang, Johny .Apa Kabar Lembaga Pangan? Ditulis pada 20 April 2018 diakses melalui <https://www.kompasiana.com/johnnymarsindang/5ad9b16c5e13733ef448d2b2/apa-kabar-lembaga-pangan?page=2> pada 24 April 2020.

Mugnisjah, Wahyu Qamara. "Situasi Perbenihan di Indonesia". Modul Kuliah. hlm.175 diakses melalui <http://repository.ut.ac.id/4535/1/LUHT4431-M1.pdf> pada 13 Januari 2020.

Putra, Wahyu Prabowo. "Pemanfaatan Uang Ganti Rugi Lahan Pertanian (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol di Desa Kedunglosari, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang)". hlm.11 diakses melalui <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/aun5c4f717ff4full.pdf> pada 6 April 2020.

Razi, M. Rahman, *Koalisi LSM Tolak Pengesahan RUU Sistem Budidaya Tanaman Berkelanjutan* ditulis pada 24 September 2019, diakses melalui <https://www.antaraneews.com/berita/1078604/koalisi-lsm-tolak-pengesahan-ruu-budidaya-pertanian-berkelanjutan> pada 28 September 2019 pukul 20.00 WIB.

Sahbani, Agus. *UU Perkoperasian Dibatalkan Karena Berjiwa Korporasi*. ditulis pada Rabu, 28 Mei 2014 diakses melalui [lt5385bfa83b01f](https://www.antaraneews.com/berita/1078604/koalisi-lsm-tolak-pengesahan-ruu-budidaya-pertanian-berkelanjutan) pada 20 Februari 2020.

Simatupang Pandjar dan I Wayan Rusastra. "Kebijakan Pembangunan Sistem Agribisnis Padi". Badan Litbang Pertanian Ekonomi Padi Beras. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjIydHy7tjgAhVCAXIKHa5xCpwQFjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.litbang.pertanian.go.id%2Fbuk%2Fekonomi-padi-beras%2Fvii.pdf&usg=AOvVaw03Qsy-hS-sj9zk3zjgv6Dp>. 26 Februari 2019.

Wayne Caldwell, *The Agricultural System: Components, Linkages, and Rationale*, Mei 2015, hlm.1 diakses melalui [https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/greenbelt/pages/1402/attachments/original/1434048607/The\\_Agricultural\\_System\\_-\\_Final.pdf?1434048607](https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/greenbelt/pages/1402/attachments/original/1434048607/The_Agricultural_System_-_Final.pdf?1434048607) pada 8 Desember 2019.

<https://www.kpa.or.id/news/blog/dewan-pakar-kpa-bongkar-kepalsuan-uu-perlindungan-dan-pemberdayaan-petani/> pada 27 Februari 2019.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181025153705-92-341433/bps-sebut-luas-lahan-pertanian-kian-menurun> pada 28 Februari 2019.

<https://republika.co.id/berita/ekonomi/pertanian/19/02/11/pmrk9g423-indonesia-kekurangan-40-ribu-penyuluh-pertanian> pada 04 Maret 2019 .

<https://www.merdeka.com/uang/ironis-pemenuhan-kebutuhan-pangan-indonesia-dipenuhi-dari-impor.html> pada 04 Maret 2019.

<https://www.merdeka.com/uang/kementan-kemendag-beda-pendapat-soal-impor-beras-jilid-ii-ini-respons-menko-darmin.html> pada 04 Maret 2019.

<https://lppbv2.atrbpn.go.id/lppb/#section3> pada 22 Maret 2020.

<https://bkpp.jogjaprov.go.id/content/page/71/Tentang-BKPP-DIY> diakses pada 02 Maret 2020.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jaminan> pada 14 April 2020

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141106091724-12-9972/mk-kabulkan-gugatan-uji-materi-hak-petani> pada 06 September 2019 pukul 11.00 WIB.

## **F. Peraturan Perundang- Undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang - Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Terhadap UUD NRI Tahun 1945;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana dan Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);

Peraturan Menteri ATR Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 966);

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.47/Permentan/SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Progam Penyuluhan Pertanian.